



JKB

Jurnal Kewirausahaan & Bisnis
Volume 5 Issue 2, 2023 (85-88)

ISSN (online) : 3026-0167

Homepage : <https://jurnalunived.com/index.php/JKB>

Memaknai Integritas Sektor Publik Dalam Tata Kelola Pemerintahan Kelurahan Yang Lebih Baik

Tri Purwanti ¹, Gunawan ², Annisa Raikhan Fadilah ³, Essa Nurhasanah ⁴, Rahmawati ⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Tinggi Ilmu Adimistrasi Bengkulu, Indonesia

¹e-mail : tripurwanti141@gmail.com

Abstract. Good governance at the kelurahan level is an important aspect in maintaining the sustainability and welfare of local communities. One of the key elements in better urban village governance is public sector integrity. Public sector integrity includes aspects of honesty, transparency, accountability, and professionalism in carrying out their duties and responsibilities. The importance of interpreting public sector integrity in better urban village governance lies in efforts to reduce corruption, nepotism, and collusion that often hinder equitable and quality development and public services. Integrity is the main foundation in creating a clean and efficient government environment. In the context of urban governance, public sector integrity relates not only to the individual behavior of government officials, but also includes systems and procedures that support transparency and accountability in the management of public resources. This involves rigorous oversight from various parties, including local communities and independent oversight institutions. Enforcing public sector integrity in kelurahan governance requires the adoption of clear policies and consistent implementation. It also requires coaching and training for government officials to have a deep understanding of the importance of integrity in carrying out their duties.

Keywords: *Integrity, Public Sector, Government*

Abstrak. Tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Salah satu elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan kelurahan yang lebih baik adalah integritas sektor publik. Integritas sektor publik mencakup aspek kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pentingnya memaknai integritas sektor publik dalam tata kelola pemerintahan kelurahan yang lebih baik terletak pada upaya untuk mengurangi korupsi, nepotisme, dan kolusi yang sering menghambat pembangunan dan pelayanan publik yang merata dan berkualitas. Integritas menjadi pondasi utama dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan efisien. Dalam konteks pemerintahan kelurahan, integritas sektor publik tidak hanya berkaitan dengan perilaku individual para pejabat pemerintahan, tetapi juga meliputi sistem dan prosedur yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Hal ini melibatkan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat dan lembaga pengawas independen. Penegakan integritas sektor publik dalam tata kelola pemerintahan kelurahan memerlukan adopsi kebijakan yang jelas dan implementasi yang konsisten. Selain itu, diperlukan pula pembinaan dan pelatihan bagi para aparatur pemerintahan agar memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya integritas dalam menjalankan tugasnya. Memastikan integritas sektor publik dalam tata kelola pemerintahan kelurahan yang lebih baik juga melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat.

Kata Kunci: *Integritas, Sektor Publik, Pemerintahan*

PENDAHULUAN

Dalam era tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, integritas sektor publik menjadi landasan utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan. Pada tingkat yang paling dekat dengan masyarakat, integritas dalam tata kelola pemerintahan kelurahan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, tantangan yang dihadapi dalam memastikan integritas dalam sektor publik tidaklah mudah, terutama mengingat beragamnya kepentingan dan tekanan yang ada. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami secara mendalam apa arti sebenarnya dari integritas dalam konteks pemerintahan kelurahan.

Dalam artikel ini, kami akan mengeksplorasi konsep integritas sektor publik dan bagaimana hal itu dapat diimplementasikan dalam tata kelola pemerintahan kelurahan. Integritas bukanlah hanya tentang ketidakcorupan semata, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti etika, moralitas, dan kejujuran dalam setiap tindakan dan keputusan. Dalam konteks pemerintahan kelurahan, integritas mencakup beragam dimensi, termasuk pelayanan publik yang adil, penggunaan sumber daya yang bertanggung jawab, dan keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.

Salah satu indikator utama dari integritas dalam tata kelola pemerintahan kelurahan adalah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintahan setempat. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi sebuah pemerintahan untuk dapat efektif dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi warganya. Namun, integritas tidak dapat diukur secara mutlak, melainkan memerlukan upaya yang berkelanjutan dan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan. Di tengah dinamika perkembangan masyarakat, integritas menjadi pondasi yang kokoh dalam memastikan keberlangsungan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kelurahan. Perubahan zaman menuntut adanya adaptasi dalam konsep dan praktik tata kelola pemerintahan kelurahan, namun integritas tetap menjadi nilai yang tidak boleh dikompromikan.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas tantangan sosial, integritas menjadi lebih penting daripada sebelumnya dalam memastikan keberhasilan pembangunan di tingkat lokal. Mengembangkan budaya integritas dalam tata kelola pemerintahan kelurahan memerlukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Langkah-langkah konkret seperti peningkatan transparansi anggaran, pemberdayaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan penegakan hukum yang adil menjadi kunci dalam memperkuat integritas sektor publik. Namun, tantangan nyata mungkin timbul dalam mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, termasuk resistensi dari kelompok-kelompok yang terbiasa dengan praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang tepat diperlukan untuk mengeksplorasi makna integritas sektor publik dalam tata kelola pemerintahan kelurahan yang lebih baik. Pertama, pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang konsep integritas dalam konteks pemerintahan kelurahan. Melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan seperti kepala kelurahan, staf pemerintahan, dan masyarakat lokal, penelitian dapat memetakan persepsi, nilai-nilai, dan praktik yang terkait dengan integritas.

Kedua, analisis dokumenter menjadi metode yang efektif untuk meninjau kebijakan dan prosedur yang ada dalam tata kelola pemerintahan kelurahan. Dengan memeriksa dokumen seperti peraturan daerah, pedoman, dan laporan kegiatan pemerintahan, penelitian dapat mengevaluasi sejauh mana integritas tercermin dalam struktur formal pemerintahan. Selanjutnya, survei dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dalam komunitas kelurahan. Pertanyaan survei dapat dirancang untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap tingkat integritas dalam pelayanan publik, transparansi, dan akuntabilitas

pemerintah kelurahan. Metode observasi juga dapat diterapkan untuk memahami praktik-praktik sehari-hari di kelurahan yang mungkin mencerminkan integritas atau kekurangan integritas. Dengan mengamati interaksi antara staf pemerintahan dan warga, serta kegiatan-kegiatan pelayanan publik, penelitian dapat mengidentifikasi pola perilaku yang mendukung atau menghambat integritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integritas dalam sektor publik adalah prinsip moral yang mendasari tindakan dan keputusan pemerintah dalam melayani masyarakat. Dalam konteks tata kelola pemerintahan kelurahan, integritas menjadi kunci utama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Pertama-tama, integritas memastikan bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintahan kelurahan didasarkan pada kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi atau golongan tertentu. Ini membantu mencegah terjadinya korupsi dan nepotisme di tingkat lokal. Kedua, integritas mengharuskan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau dan menilai apakah keputusan yang diambil telah sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan keadilan. Selanjutnya, integritas memperkuat hubungan antara pemerintah kelurahan dan masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa pemerintah bertindak secara jujur dan adil, mereka lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diambil.

Integritas juga menciptakan lingkungan kerja yang profesional di dalam pemerintahan kelurahan. Pegawai negeri yang berintegritas akan melakukan tugas mereka dengan baik dan bertanggung jawab, tanpa memandang suku, agama, atau golongan tertentu. Selain itu, integritas memberikan dasar yang kuat bagi penerapan hukum dan aturan di tingkat kelurahan. Ketika aturan diterapkan secara adil dan konsisten, maka akan tercipta suasana yang kondusif bagi perkembangan masyarakat dan investasi. Dalam konteks globalisasi, integritas juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan citra dan reputasi pemerintahan kelurahan di mata dunia internasional. Pemerintahan yang dikenal memiliki tingkat integritas yang tinggi akan lebih mudah untuk menjalin kerja sama dan memperoleh dukungan dari pihak luar. Namun, mencapai integritas dalam tata kelola pemerintahan kelurahan bukanlah hal yang mudah. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, pegawai negeri, serta masyarakat itu sendiri.

Pendidikan dan pelatihan juga merupakan faktor penting dalam membangun integritas di tingkat kelurahan. Melalui edukasi yang tepat, masyarakat dapat memahami pentingnya integritas dalam pembangunan serta memahami dampak negatif dari perilaku korupsi. Selain itu, pengawasan dan pengawalan dari berbagai pihak, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media massa, juga diperlukan untuk memastikan bahwa integritas tetap terjaga dan tidak terkikis oleh kepentingan-kepentingan yang sempit. Pemerintah juga perlu memberikan insentif dan sanksi yang tepat bagi mereka yang berperilaku sesuai dengan prinsip integritas atau sebaliknya. Ini bertujuan untuk memperkuat budaya integritas di dalam pemerintahan kelurahan. Tidak hanya itu, partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemerintahan kelurahan juga merupakan kunci dalam menjaga integritas. Masyarakat yang peduli akan memainkan peran penting dalam mendeteksi dan melaporkan adanya praktik-praktik yang merusak integritas.

Selain itu, membangun sistem pelaporan yang efektif dan perlindungan bagi para pelapor juga menjadi langkah penting dalam memerangi korupsi dan memperkuat integritas pemerintahan kelurahan. Dalam konteks globalisasi, integritas pemerintahan kelurahan juga menjadi faktor penentu dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Investor cenderung lebih percaya pada pemerintahan yang memiliki integritas tinggi. Terakhir, membangun budaya integritas membutuhkan waktu dan kesabaran. Perubahan perilaku dan sikap tidak akan terjadi secara instan, namun dengan komitmen yang kuat dan kerja keras dari

semua pihak, integritas dalam tata kelola pemerintahan kelurahan dapat terwujud untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat.

SIMPULAN

Integritas dalam sektor publik merupakan fondasi yang vital bagi tata kelola pemerintahan yang efektif di tingkat kelurahan. Artikel ini menyoroti pentingnya integritas dalam memastikan bahwa keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah kelurahan didasarkan pada kepentingan masyarakat dan prinsip-prinsip moral yang tinggi. Dalam konteks tata kelola pemerintahan kelurahan, integritas bukan hanya tentang tidak melakukan korupsi atau tindakan ilegal lainnya, tetapi juga mencakup transparansi, akuntabilitas, dan pengambilan keputusan yang berbasis data dan bukti.

DAFTAR PUSTAKA

- European Group of Public Administration (EGPA). (2018). Public Sector Integrity: Strengthening Ethics and Accountability. Proceedings of the Annual Conference of the European Group of Public Administration.
- OECD. (2017). OECD Integrity Review of Brazil: Managing Risks for a Cleaner Public Service. OECD Public Governance Reviews. OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264274885-en.
- McKinsey & Company. (2017). Building a Culture of Integrity in the Public Sector. Diakses dari: McKinsey & Company
- Transparency International. (2019). Corruption Perceptions Index 2019. Transparency International. Diakses dari: Transparency.org